BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 81 /KPTS/ III /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN ADMIN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS, TIM ASSESSOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH, TIM ASSESSOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH, DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT OPD DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menetapkan Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-Undang;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Thaun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupatai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Assessor Tingkat OPD, Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

α

a. Admin Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas melaksanakan penatausahaan kegiatan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dalam penilaian dan mempersiapkan kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
b. Tim Assessor Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerintah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
c. Tim Assessor OPD melaksanakan penilaian Sebagian dari komponen penetapan tujuan bagian strategi pencapaian sasaran strategis tingkat OPD dan komponen struktur dan proses;
d. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penjaminan kualitas komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerintah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
e. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD melaksanakan penjaminan kualitas pada komponen penetapan tujuan bagian strategi pencapaian sasaran tingkat OPD dan komponen struktur dan proses;

KETIGA : Tim Assessor tingkat pemerintah daerah dan Tim Assessor tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada koordinator pelaksanaan penilaian mandiri yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan Tim Penjaminan Kualitas tingkat pemerintah daerah dan Tim Penjaminan Kualitas Tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator penjaminan kualitas yaitu Inspektur Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Maret 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 /KPTS/ III /2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TENTANG : ADMIN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	OPD	NAMA
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan SDA	Yuyun Mustafa,S.STP/19870222 200701 2 001
2.	Bagian Hukum dan Organisasi	Ferry Arumajaya,SH,M,Hum/19860723 2010001 1 004

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	13/04-24.
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 / KPTS / III / 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TENTANG : SUSUNAN TIM ASSESSOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	OPD	Nama
1	Sekretariat Daerah	Drs. H.M Syahril Abd. Radjak, M.Si
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ibrahim Fabanyo / 197011231997021002
3		Vianne Ivanna M. Ratulangi,SE/19770109 200501 2 012
4		Irsan, SE / 19760920 201001 1 009
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Didin Usman, SP.,MMA/19801127 200501 1 012
7		Hassanuddin Syamsudin,S.Kom/19821211 201001 1 009
8		Nurlaili, SE / 19840503 200604 2 009
9		Nurafiany A.R,SE/19821211 200312 2 003
10	Inspektorat	Sarif Kemhay,SIP /19830405 200604 1 012
11		Agnes Saptiany, S.Kom/ 19840804 201101 2 004

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 / KPTS / III / 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TENTANG : SUSUNAN TIM ASSESSOR TINGKAT OPD PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	OPD	NAMA	JABATAN DI OPD
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	YUYUN MUSTAFA, S.IP	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan
		WEMPI MANOA, SE	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam
2	Bagian Hukum dan Organisasi	DARYANTI KATIMPALI, SH	Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
		FERAWATI SILALAHI	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
		FERRY ARUMAJAYA	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana
4	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	IMELDA S. GIAM	Kepala Sub Bagian Umum
		IRFAN MALIK BAILUSSY	Kepala Sub Bagian Perencanaan
		ISMAT ADE BAITJI	Kepala Sub Bagian Keuangan
5	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	ASRAWI S.BASRA, S.PDi	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual
		HERLINA Hi. NURDIN	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
			Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja
6	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Humas)	DONSON OHBER LALU	Kepala Sub Bagian Protokoler
		MUHAMMAD KHOIRI	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan (Humas)
		ERDIETH BERNARTO SENAEN, S.Kom	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
7	Sekretariat DPRD	SAFRI DENGO, SE. M.Si.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
		HERAWATI NURDIN,S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
		ASMA A. HUKU, SE	Analis SDM Aparatur
8	Inspektorat Daerah	REINHARD BUNGA, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris
		FEMMY Y. SUWATALBESSY	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
		MUHAMMAD NUR SAID	Perencana
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UDIN ELA – ELA,S.Pd,MM	Sekretaris
		RUSNANI ALWAHID, SE. M.AP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		YAMES DORA, ST	Perencana
10	Dinas Kesehatan	MUHAMMAD KADRI UMASANGAJI,SE	Sekretaris
		HANDIKA IRYANTO, AMD	Kepala Sub Bagian Keuangan
		SITTI NURLAILAH,SKM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	RAHMAT PATTY,SKM	Sekretaris
		ANSAR A. HAMID,ST	Kepala Sub Bagian Keuangan
		FRIDA DAMAYANTI PATAYANG	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
12	Satuan Polisi Pamong Praja	ABDURRAHMAN DJALAL, S,HUT,M.Sc	Sekretaris
		MARDIANA NGENDRE, S.SOS	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		NURNIATI KAMALUDIN, SE	Kepala Sub Bagian Program

13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KUSMANUR,SP	Sekretaris
		CHARLES SORE,S.Pd	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		MAGDALENA RENYAAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. FARIS H. ABD,ST,MT	Sekretaris
		ISMID, ST	Perencana
		FIRYANI GAFUR,SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
15	Dinas Perhubungan	BUSTAMIN , SH	Sekretaris
		STANLEY HENDRA RATULANGI, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		WIDYAH NINGSIH RURAY,SE	Perencana
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	HIKLER MURARY,ST,M.Si	Sekretaris
		GAMLAMO SUNARDI SAMIUN,SE	Perencana
		MUNIRA W. DJUMA, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	YAFET	Sekretaris
		LA SAHRUDDIN LA SUCI, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		NURSIA NUR, SE	Perencana
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	UJIN DJAFAR,SP	Sekretaris
		FAHIMA ABD. RAHMAN, SH.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		DINO MUHAMAD PUAEN, SH	Perencana
19	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	MUHAMMAD MARASABESSY,SE	Sekretaris
		HAIRAWATY, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		SARMI ODE, SE	Perencana
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	MARIANA DATANG,S.Pd	Sekretaris
		ELIZABET MAGDALENA JAN, S.Pd	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	HESBI MISEN,S.Th,MM	Sekretaris
			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		AINATUL KHUSNAH,S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
22	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	SHERLY KRISTINA,S.Pd	Sekretaris
			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		ARMAN HI. SAFI, S.IP	Perencana
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	SELFI TOMY,S.Pd,M.Si	Sekretaris
		ETI ABDULLAH, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		BAHRI TOMAHIR	Perencana
24	Dinas Pendapatan Daerah	MARHAEN ANTHONIUS BAURA,S.Si.Teol,m.sI	Sekretaris
		SITINAPSI LEWENUSA	Kepala Sub Kepegawaian
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	HERMAN RATUPARE, ST	Sekretaris
		DANIEL TOGOLOBE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	GREIS HARDY SINAHU,SP	Sekretaris
		UMMU KALSUM,SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		DIDIT WAHYUDI, SP, M.Si	Perencana

27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IBRAHIM FABANYO	Sekretaris
		DWI MARJIANTO TUKUBOYA	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		YARKON MARAU	Perencana
28	Badan Pengelola Keuangan Daerah	DIDIN USMAN, SP.,MMA	Sekretaris
		MUHAMAD RIZAL, S.Pd	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		ALBAR	Perencana
29	Badan Kepegawaian dan Diklat	RINI AGUSTIANI, S.Sos	Sekretaris
		JUNUS DJINI	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		YANSEN KODA, S.KOM	Perencana
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	MUHAMAD ADE FABANYO	Sekretaris
		SAMIUN MUHAMMADIN, A.Md.	Kepala Sub Bagian Umum
		KATMI M. USMAN, S.Pi	Kepala Sub Bagian Program/ Perencanaan dan Pelaporan
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	MUSA MOMAMI	Sekretaris
		NANIK KARTINI, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		MOHAMMAD SALEH RUMALUTUR	Perencana
32	RSUD Jailolo	RITNA TANI, S.ST.,MM	Sekretaris
		BUDI ISTIAR	Kepala Sub Bagian Umum
		MUAMAR, S.KM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
33	Kecamatan Jailolo	IRWAN HUSAIN,SE	Sekretaris
		IDRUS IWAN ABDURRAHMAN	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
34	Kecamatan Jailolo Selatan	MASLAN,SH	Sekretaris
		ETHI HI GANI	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		ANDRI HI GANI	Kasubbag. Keuangan
35	Kecamatan Loloda	KASPAR SAKLARESSY	Sekretaris
		DONALDO KAYELY	Kasie. Ketentraman dan Ketertiban
36	Kecamatan Sahu	DARWIN SALMIN, S.Pd	Sekretaris
		KAMIL SARMADA	Kasubbag. Kepegawaian
		HIJRAH HISKILAFS.SOS	Kasubbag Program dan Keuangan
37	Kecamatan Sahu Timur	YOSEP BODO, S.IP	Sekretaris
		DONALD SUWATALBESSY	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		FRANSIUS LENGE, SH	Kasie. PMD
38	Kecamatan Tabaru	MARLINCE DJOREBE	Sekretaris
		ADELFONI SAIBELE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		MERRY HADI	Kasubag. Keuangan
39	Kecamatan Ibu	YORAM SOLEMAN,S.PD,MM	Sekretaris
		ABDULKARIM A. KADIR	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		ABDUL LATIF ALI	Kasubag Program dan Keuangan

40	Kecamatan Ibu Selatan	BAHRUN WALANDA	Sekretaris
		JADI WALANDA	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
		IDAMIN LEFANG	Kasubag Program dan Keuangan
41	Kecamatan Loloda Tengah	MALIUS WALANDA OTNIEL DAGILADA HOPNI TUANDALI	Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Program danKeuangan

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 / KPTS / III / 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TENTANG : SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	NIP
1.	REINHARD BUNGA, S.Pd., M.Pd, CRMO.,QRMP	Plt. INSPEKTUR SELAKU KOORDINATOR TIM PENJAMIN KUALITAS	198308152009031001
2.	HENDRIS ANIKY, S.Pd	INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI	198401122009031004
2.	Dra. Hj. FENTI KAMIYANTI, M.M, CPRM, CFIP, QRMP	AUDITOR MADYA	196602261993032006
3.	MHD. RIDWAN HANDJI, SH	AUDITOR MADYA	196512151993031015
4.	ABD. LATIF SULEMAN, A.MD, SE,M.AP	P2UPD MADYA	197506272001121004
5.	MASRIANI,SE	AUDITOR PERTAMA	199502052019032001
5.	WINDA IRIANTISIHASALE,SE, CGAA, QRMA	AUDITOR PERTAMA	198806162019032002

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 / KPTS / III / 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TENTANG : SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT OPD PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Reinhard Bunga, S.Pd., M.Pd, CRMO.,QRMP	Plt. Inspektur selaku koordinator Penjamin Kualitas	198308152009031001
2.	Hendrik Sarapung,SP	Inspektur Pembantu Wilayah IV	197306202007011018
3.	Djana Dwi Martini, SE	Auditor Madya	196703292000032006
4.	Lutfi Buamonabot, SP., MMA	P2UPD madya	197412272005011008
4.	Nurjadi S. Baranyanan,SP	Auditor Muda	198004192010012013
5.	Husny Abd. Latif,S.IP	Auditor Pertama	198906122019031001
6.	Adi Irawan,SE	Auditor Pertama	197712072006041007
7.	Sitna Hamid,S.IP	Auditor Pertama	197901212014092002
8.	Muhammad Risal, SP	Staf Evaluasi & Pelaporan	197712012005011012
9.	Rahman Muhiddin, SP	Staf	197004011998021006
10.	Dies Natalis Panudu, S.IP	Staf	197501062006041005
11.	Apner Doda,S.Pd	Staf	198512252020122008
12.	Novita Cicilia Pattirane, SE	Staf	199411112020122025
13.	Zulfikar Muhammad, S.IK	Staf	199403062019031002
14.	Anastasia Dara, S.kom	Staf	198410272010012009
15.	Asmani, SKM	Staf	198102222005012011

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG